



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru / PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ridwan Comeng,S.H.,M.H., Usman Ashadinata,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Ridwan Comeng,S.H.,M.H., dan Rekan bertempat di Jalan Tuanku Tambusai/Jl.Nangka Komplek Ruko Nangka Raya Permai Blok B No.13 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/RC&R/Khus/VI/2020 tanggal 02 Juni2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 218/2020 tanggal 2-06-2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 05 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 6 Muharram 1432 H/ 12 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxXII/2010 Tanggal 13 Desember 2011.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah SAH menurut hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami dan Istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat selama 6 (enam) tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2017.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya Suami – Istri (Ba'da Dhukul), dan telah telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama anakyang lahir di Pekanbaru pada Tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Tgl 26 Desember 2013.
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai meskipun ada terjadi pertengkaran kecil namun antara Penggugat dan Tergugat bisa saling memahami sehingga rukun kembali.
6. Bahwa sekira bulan Juni Tahun 2012 disaat anak masih berusia 2 (dua) tahun, kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berujung TERGUGAT pergi meninggalkan rumah selama 6 (enam) bulan.
7. Bahwa sekira tahun 2013 Tergugat ingin pulang untuk rujuk kembali dengan Penggugat, namun Tergugat terlebih dahulu menemui orang tua

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat meminta maaf dan ingin hidup rukun kembali bersama Penggugat.

8. Bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, sekira tahun 2016 kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang berulang ulang.
9. Bahwa keributan yang sering terjadi disebabkan hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan tidak mau mendengarkan sedikitpun pendapat Penggugat.
 - Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat selaku istri dalam hal keuangan.
 - Tergugat menuduh pihak keluarga Penggugat selalu ikut campur bila terjadi pertengkaran, padahal tidak satupun pihak keluarga yang terlibat ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah peduli disaat Penggugat membutuhkan nasehat, masukan dan bantuan dikala ada permasalahan.
10. Bahwa puncaknya sekira awal tahun 2017 keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, pertengkaran yang tak berkesudahan itu berujung Tergugat menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan memutuskan untuk meninggalkan rumah.
11. Bahwa sudah 2 (dua) tahun lamanya sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sekira awal tahun 2017 hingga saat ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pekanbaru, Tergugat tidak pernah kembali lagi pulang bahkan Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat.
12. Bahwa Penggugat berupaya membangun kembali komunikasi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun Tergugat tidak sedikitpun menanggapi dengan tidak pernah lagi kembali kerumah tempat tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira tanggal 10 Mai 2019 Tergugat dating menemui orang tua Penggugat menyatakan Talak 2 (Dua) dihadapan orang tua Penggugat dengan menyertakannya secara yang secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan diatas meterai 7000.
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15. Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
- 2) Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xxkepada Penggugat xx;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang pemeriksaan perkara a quo Penggugat hadir secara *in person*, dan di damping oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/XII/2010 tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan menyerahkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 129 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. : saksi

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2010;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat selalu menuduh keluarga Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2017;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

2. saksi.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir tahun 2010;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada kepercayaan kepada Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat selalu menuduh keluarga Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2017;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam masalah keuangan, selain dari itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal . pihak keluarga telah memusyawarahkan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil , dan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam masalah keuangan, selain dari itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal . pihak keluarga telah memusyawarahkan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil, dan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xx kepada Penggugat xx;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp513.000,-(lima ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	Biaya PNBPRp	20.000,-	
5.	Hak RedaksiRp.	10.000	,-
6.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.	513.000,-

(lima ratus tiga belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.,